

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi suatu negara di samping memerlukan program pembangunan yang terencana dan terarah untuk mencapai sasaran pembangunan, dibutuhkan faktor lainnya seperti halnya modal atau dana pembangunan yang cukup besar. Peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu ditunjang dengan peningkatan dana pembangunan. Umumnya suatu negara mengalami keterbatasan dalam penyediaan dana pembangunan, untuk itu diperlukan mobilisasi dana dari masyarakat. Demikian pula dengan negara Indonesia, hal ini dicirikan dengan dikeluarkannya serangkaian kebijakan pemerintah di bidang moneter, keuangan, dan perbankan yang bertujuan untuk menghimpun dana pembangunan, baik melalui lembaga keuangan maupun bentuk Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan pemerataan kesempatan usaha bagi pelaku-pelaku pembangunan ekonomi baik pengusaha berskala kecil, koperasi, maupun pengusaha berskala menengah dan besar (*Affif, 1996*).

Dalam hal ini, kegiatan perkreditan merupakan kegiatan utama bahkan merupakan tulang punggung kegiatan perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan. Berbeda dengan manajemen kredit (piutang) pada perusahaan pada umumnya, manajemen kredit pada sektor perbankan adalah bagian dari manajemen dana bank yang sesuai dengan fungsinya sebagai bank yaitu menghimpun dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund/surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan dengan misi meningkatkan pendapatan masyarakat (*Dendawijaya, 2001*). Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk kredit (manajemen kredit) ini merupakan prioritas kedua kegiatan operasional bank setelah menjaga likuiditas minimal (manajemen likuiditas).

Mengingat kondisi perbankan nasional yang mengalami krisis sejak tahun 1997, diawali dengan dilikuidasinya 16 bank swasta nasional berlanjut dengan terdapatnya sejumlah bank yang dibekukan kegiatan usahanya, sejumlah bank diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah serta sejumlah bank yang terpaksa harus direkapitalisasi (juga oleh pemerintah). Menyadari hal tersebut maka sangatlah dibutuhkan kemampuan yang baik dalam mengelola kredit perbankan (manajemen kredit) bagi para pihak pengelola bank agar bank dapat terus beroperasi dan menjaga tingkat kesehatannya pada posisi yang diharapkan.

Kondisi tersebut bukanlah semata-mata disebabkan oleh anjloknya nilai rupiah terhadap dollar Amerika sebagai pemicu krisis ekonomi berkepanjangan, melainkan juga akibat perilaku sebagian bankir atau pengelola bank yang tidak menghiraukan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terutama yang berkenaan dengan kegiatan perkreditan, mengenai Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), serta rasio-rasio yang harus dipenuhi seperti Batas Maksimum Pemberian Kredit, Rasio Kecukupan Modal, Likuiditas, dan lain sebagainya (*Firdaus, 2004*).

Terlepas dari kualitas kredit maupun sebaran penyaluran kredit kepada pihak-pihak yang memperoleh fasilitas kredit, tidak dapat dipungkiri bahwa serangkaian kebijakan tersebut diatas memiliki peran penting dalam: 1) menjaga kelancaran operasional dunia perbankan dalam menjalankan fungsinya selaku lembaga keuangan; 2) memobilisasi dana masyarakat; dan 3) menyalurkan dana demi meningkatkan kemajuan ekonomi Indonesia.

Sebagai salah satu bank swasta nasional yang pertama didirikan di Indonesia, PT. Bank Lippo, Tbk mengalami pertumbuhan yang cukup berarti sejak awal berdirinya pada tahun 1948. PT. Bank Lippo, Tbk telah berhasil menjadi salah satu bank swasta di Indonesia sekaligus bank devisa yang melayani kebutuhan masyarakat sebagaimana fungsinya yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat, serta menawarkan berbagai bentuk layanan dan produk jasa berkualitas yang berkaitan dengan kegiatan perbankan. Demi tetap

mempertahankan kinerjanya sebagai bank papan atas serta dalam menghadapi persaingan perbankan yang semakin ketat, dibutuhkan analisis dan pengendalian melalui langkah-langkah yang strategis dalam mempertahankan bahkan meningkatkan tingkat kesehatan bank.

Dari uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengambil topik yang berjudul **“ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK MENGGUNAKAN METODE CAMEL DI PT. BANK LIPPO, Tbk”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah pokok yang dihadapi oleh dunia perbankan adalah bagaimana mengelola tingkat kesehatan bank tersebut. Kinerja kredit merupakan salah satu peran penting dalam mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Memberikan atau menyalurkan kredit pada dasarnya bukanlah suatu pekerjaan yang sulit, namun apabila di kemudian hari ternyata kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka untuk menanganinya diperlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Hal ini akan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank secara keseluruhan, karena meskipun ada jaminan (*collateral*) yang dapat dipakai untuk menutup kerugian, akan tetapi pengambilalihan jaminan tersebut memerlukan waktu dan biaya. Oleh sebab itu, kinerja kredit perbankan merupakan salah satu tolak ukur yang dapat mempengaruhi dalam penilaian tingkat kesehatan bank dari segi permodalan, asset, manajemen, profitabilitas maupun likuiditas.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mencoba melakukan penelaahan dan merumuskan masalah yang ada sebagai berikut :

- Bagaimanakah tingkat kesehatan dari PT. Bank Lippo, Tbk pada tahun 2001-2005?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan pada PT. Bank Lippo, Tbk pada tahun 2001-2005.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi penulis, selain berguna sebagai bahan penyusunan skripsi, penelitian ini juga berguna untuk menambah ilmu, pengalaman, serta pemahaman masalah manajemen keuangan khususnya bidang perbankan di Indonesia dan serta menambah pengetahuan mengenai tingkat kesehatan bank umum.
2. Bagi objek yang diteliti, dalam hal ini adalah PT. Bank Lippo, Tbk secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi tingkat kesehatan suatu bank sehingga membantu pihak manajemen bank ataupun yang berwenang dalam menjaga tingkat kesehatan bank pada posisi yang diharapkan.
3. Bagi kalangan pendidikan dan pembaca umumnya, diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha beserta mahasiswa sehingga dapat digunakan sebagai informasi dalam studi perbandingan untuk mengetahui tata cara penilaian serta metode dalam mengukur tingkat kesehatan sebuah bank umum serta pemecahannya bagi dunia perbankan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Salah satu faktor yang menunjang dalam kegiatan suatu perusahaan adalah modal. Suatu perusahaan dapat membelanjai pengembangan usahanya dengan menggunakan modal sendiri, atau dapat pula sebagian atau seluruh modal dibelanjai dari pihak lain dalam bentuk pinjaman atau kredit. Tentunya, pertimbangan penggunaan modal dari pihak lain ini tanpa mengabaikan keuntungan bagi kegiatan usahanya.

Pinjaman yang berjangka waktu tertentu umumnya dikenal dengan istilah kredit. Yang termasuk ke dalam unsur-unsur kredit adalah: kepercayaan, jangka waktu, sejumlah uang, hasil bunga, jaminan, dan risiko.

Pemberian kredit merupakan fungsi utama bank seperti yang tercantum pada pasal 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Salah satu hal terpenting dalam kegiatan operasional bank adalah perkreditan. Bagi sebuah bank, dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan lainnya, pemberian kredit pada nasabahnya merupakan sumber pendapatan atau keuntungan yang terbesar, baik kredit untuk modal kerja maupun yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu sesuai dengan tujuan setiap perusahaan untuk meningkatkan pendapatannya dan menjaga kelangsungan hidupnya maka pemberian kredit merupakan hal yang pasti secara terus menerus akan dilakukan oleh bank dalam kesinambungan operasionalnya.

Namun di sisi lain, penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah mengandung risiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut karena tidak seluruh nasabah yang memperoleh kredit mampu mengembalikan kredit dengan baik dan tepat pada waktu yang dijanjikan. Sehingga dampaknya pada bank ialah mengganggu tingkat kesehatan bank tersebut. Di Indonesia, kasus kredit macet memerlukan penyelesaian yang menghabiskan banyak biaya, menyita banyak waktu dan perhatian pejabat bank. Risiko

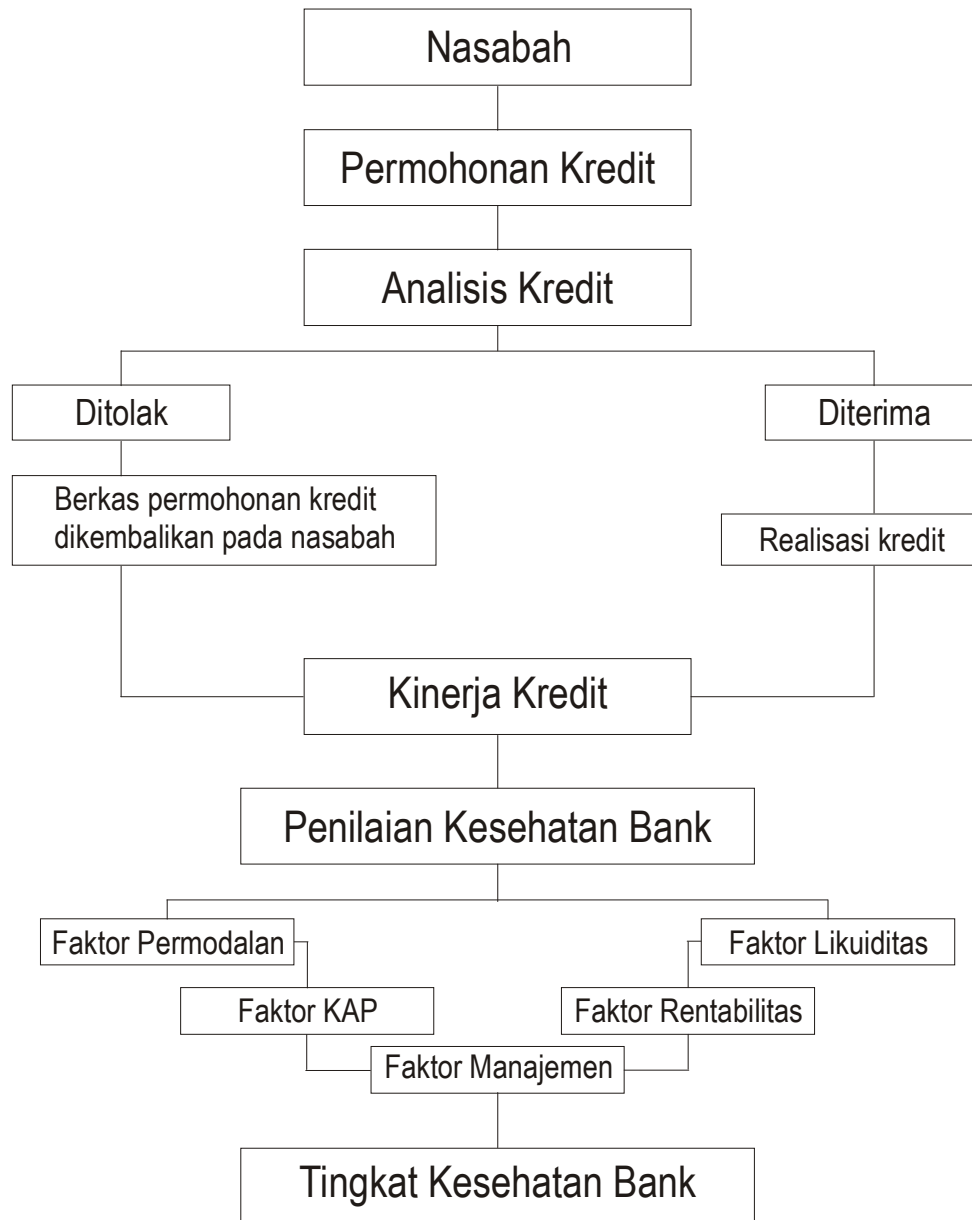
kredit macet dan bermasalah ini dapat diperkecil dengan jalan meningkatkan kinerja kredit yang disalurkan.

Oleh sebab itu, sehat tidaknya suatu bank sangatlah ditentukan oleh manajemen kredit yang dijalankan oleh bank yang bersangkutan. Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, yaitu pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, dan Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas.

Tujuan utama dari manajemen kredit ialah untuk mengelola dana yang terkumpul dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit untuk memperoleh kinerja kredit yang baik sehingga mampu menjaga kesehatan bank pada tingkat yang diharapkan.

Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam menentukan tingkat kesehatan suatu bank adalah metode CAMEL (*Capital; Assets, Management, Earnings, Liquidity*), dimana didalamnya terdapat lima faktor manajemen bank yang dinilai, diantaranya adalah faktor permodalan, faktor kualitas aktiva produktif, faktor manajemen, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas. Hasil dari perhitungan kelima faktor tersebut adalah nilai kredit (*credit point*) CAMEL yang menentukan predikat tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, apakah pada kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber : Analisis Penulis